



Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam Transparansi dan Kendala Pengelolaan Proyek Jalan Raya di Kota Semarang

Muhammad Rizqi Robbani¹, Faza Fatkhun Nadhif²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 06 Juni 2024

Revised: 13 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

This research discusses the implementation of Semarang City Public Works Department policies regarding transparency and obstacles in managing toll road projects in Semarang City. The main objective is to identify the main challenges affecting the effectiveness of project management and to assess the level of transparency in the implementation, procurement and monitoring procedures of highway projects. Case studies, field surveys, and policy analysis are the research approaches used. A complete picture of how transportation projects are implemented can be obtained by evaluating compliance with transparency standards and identifying significant barriers. The findings of this study highlight major difficulties in information transparency, cooperation of related parties, and management of resources and budgets. This article highlights the importance of increasing transparency, coordination and more effective resource allocation in the management of road projects in Semarang City. Participation or active role in the implementation of development, starting from the implementation of the planning process.

Keywords: Department of Public Works, Transparency, Highway Project Management.

(*) Corresponding Author: rizqi Robbins30@students.unnes.ac.id

How to Cite: Robbani, M. R., & Nadhif, F. F. (2024). Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam Transparansi dan Kendala Pengelolaan Proyek Jalan Raya di Kota Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12542063>

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu wilayah ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas. Peningkatan aktivitas penduduk menimbulkan permasalahan bagi pengelola kawasan karena seringkali tidak diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan aktivitas penduduk. Pemerintah daerah wajib memberikan perbaikan pelayanan dan manfaat yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan kepada masyarakat lokal (Febriyana, 2021). Kinerja pemerintah diukur dari seberapa baik pelayanan dan kesejahteraan masyarakat diberikan. Salah satu Efektivitas operasional APBD menjadi salah satu faktor penyebabnya. APBD pada hakikatnya adalah rencana keuangan daerah yang digunakan untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik dalam suatu tahun anggaran (F. Anggraeni & Saleh, 2020). ¹Salah satu sarana pendukung infrastruktur adalah jalan. Jalan merupakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk bergerak guna memenuhi kebutuhannya, baik untuk distribusi barang dan jasa maupun sebagai jalur perjalanan kendaraan darat. Kelancaran lalu lintas tergantung pada kuantitas dan kualitas jalur jalan yang tersedia.



Dalam era dinamika perkotaan yang terus berkembang, pengelolaan proyek jalan raya menjadi fondasi utama bagi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki pertumbuhan penduduk dan perekonomian yang pesat. Hal ini berdampak pada peningkatan kebutuhan akan infrastruktur jalan raya. Jalan raya merupakan sarana transportasi yang penting bagi masyarakat, baik untuk mobilitas maupun aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan raya perlu dilakukan secara optimal. Pembangunan infrastruktur jalan raya di Kota Semarang dapat didasarkan pada beberapa landasan teori. Salah satu teori yang relevan adalah teori pembangunan ekonomi, di mana peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan jalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan juga penting, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial agar pembangunan jalan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Landasan teori ini dapat membantu merancang dan melaksanakan proyek infrastruktur jalan yang berdampak positif secara menyeluruh.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) memegang peranan krusial dalam memastikanelancaran, keberlanjutan, dan efisiensi dari setiap proyek jalan yang direncanakan dan dilaksanakan. Meskipun demikian, tantangan terkait maladministrasi dalam proyek-proyek tersebut masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ketidaktransparan, penyalahgunaan dana, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan proyek jalan raya dapat merugikan tidak hanya efisiensi pelaksanaan proyek tetapi juga dapat merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi strategi optimalisasi pengelolaan proyek jalan raya oleh Dinas Pekerjaan Umum guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (DPUPR) merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan raya di Kota Semarang dan harus mengoptimalkan pengelolaan proyek jalan raya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Manajemen proyek jalan raya yang optimal dapat didefinisikan sebagai pengelolaan proyek jalan raya berkualitas tinggi tepat waktu dan sesuai anggaran. Di Kota Semarang, jaringan jalan yang membentang sepanjang 1.012 ruas, dengan total panjang mencapai 319 kilometer, menjadi tulang punggung bagi mobilitas dan konektivitas dalam kehidupan kota. Data statistik yang tercatat menyoroti keadaan jalan tersebut dengan detail yang menggambarkan kondisi infrastruktur yang sangat vital ini. Dari statistik yang tersaji, terlihat bahwa mayoritas dari jalan-jalan ini, sekitar 55.1%, berada dalam kondisi yang dapat dikategorikan sebagai baik. Meskipun kondisi mayoritas jalan terbilang memuaskan, data juga menunjukkan bahwa sekitar 35.6% jalan menunjukkan tanda-tanda kondisi sedang yang memerlukan perhatian lebih terhadap pemeliharaan dan perbaikan. Adapun sekitar 6.4% jalan menunjukkan gejala kerusakan ringan, sementara hanya sekitar 2.8% jalan yang diklasifikasikan dalam kondisi rusak.

Penelitian ini akan fokus pada pengembangan strategi yang dapat diterapkan dalam konteks administrasi proyek jalan raya, dengan tujuan mencapai

efisiensi operasional, peningkatan kualitas pekerjaan, dan pemastian bahwa kepentingan masyarakat terjamin. Dengan memahami akar permasalahan dan merinci langkah-langkah strategis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki pengelolaan proyek jalan raya serta menghasilkan rekomendasi praktis untuk penerapannya di lapangan.

Berdasarkan realitas tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan daerah di Kota Semarang terkait pengelolaan proyek jalan raya, dan sejauh mana kebijakan ini efektif dalam mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan proyek jalan raya di Kota Semarang, khususnya yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek tersebut?

METODE

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris lapangan, yang mana peneliti akan langsung terlibat dalam pengamatan di lapangan untuk menyelidiki fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks penelitian lapangan, peneliti juga akan secara rinci memahami situasi, kondisi, latar belakang, serta interaksi yang terjadi, baik di tingkat individu maupun kelompok. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini melibatkan penggunaan data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri guna menjawab pertanyaan penelitian dengan fokus tertentu. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari catatan yang tersedia di dinas terkait dan sumber lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber seperti buku, artikel, situs web, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan daerah di Kota Semarang terkait pengelolaan proyek jalan raya. Implementasi kebijakan pengelolaan proyek jalan raya di Kota Semarang telah menjadi tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur daerah. Langkah-langkah yang diambil pemerintah kota, termasuk pembentukan kerangka regulasi yang rinci, telah membawa perubahan yang signifikan. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan sejumlah kebijakan daerah yang mengatur pengelolaan proyek jalan raya. Kerangka utama yang mengatur praktik dan proses yang berkaitan dengan infrastruktur jalan adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jalan. Untuk menjaga transparansi dan pemerataan akses masyarakat, pasal-pasal dalam aturan ini mewajibkan masyarakat untuk mengetahui proyek jalan di setiap tingkatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selanjutnya, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kontrak memberikan kerangka kerja yang jelas terkait pengadaan barang, jasa, serta pelaksanaan kontrak dalam proyek jalan raya. Pasal-pasal dalam kedua peraturan ini menegaskan proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak harus dilakukan secara terbuka, sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk memastikan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan proyek tersebut. Prinsip akuntabilitas adalah pertanggung jawaban keuangan yang sejalan dengan tujuan, aturan, dan tindakan yang telah dilakukan secara bertanggung jawab kepada masyarakat baik dalam tataran administratif maupun politik. Hal ini juga melibatkan pelaporan berkala dan diskusi bersama yang menjadi dasar pengambilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.² Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki peran krusial dalam pengelolaan proyek jalan raya di suatu daerah. Transparansi dalam aktivitas dan keputusan yang diambil oleh Dinas PU menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas serta keberhasilan proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada masyarakat melalui penyediaan layanan pembangunan infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat, dan tanggung jawab atas seluruh kebijakan, keputusan, dan hasil kerja. Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas segala akibat dari setiap pembangunan yang dilakukan jika pembangunan tidak memenuhi harapan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pemilihan kontraktor atau tender proyek jalan raya, Dinas Pekerjaan Umum telah mengadopsi pendekatan yang modern dengan melaksanakan proses tender secara daring melalui platform resmi yang dapat diakses melalui situs web resmi mereka, yakni <https://lpse.semarangkota.go.id/eproc4/lelang>. Melalui penggunaan platform elektronik ini, mereka memfasilitasi seluruh tahapan tender secara terbuka dan transparan, memungkinkan peserta, pihak terkait, dan masyarakat umum untuk mengakses informasi terkait dengan proses tender tersebut. Penggunaan platform elektronik ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan proses tender manual. Pertama, platform elektronik dapat memfasilitasi seluruh tahapan tender secara terbuka dan transparan. Hal ini berarti bahwa seluruh informasi terkait dengan proses tender, mulai dari pengumuman tender, persyaratan peserta, dokumen penawaran, hingga evaluasi penawaran, dapat diakses oleh peserta tender, pihak terkait, dan masyarakat umum. Kedua, platform elektronik dapat meningkatkan aksesibilitas informasi terkait proses seleksi kontraktor. Hal ini karena platform elektronik dapat diakses melalui internet, sehingga peserta tender dan pihak terkait tidak perlu datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan informasi terkait proses tender. Ketiga, pentingnya transparansi dalam mendukung integritas dan kualitas dalam pelaksanaan proyek jalan raya tidak bisa diabaikan. Kemampuan platform elektronik dalam memberikan transparansi tinggi dapat mengurangi potensi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses tender. Lebih jauh lagi, transparansi dalam proses tender proyek jalan raya membawa dampak positif dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan proyek. Misalnya, dengan memberikan akses publik terhadap informasi seputar tender, potensi terjadinya praktik-praktik tidak etis seperti kolusi atau suap dapat ditekan. Selain itu, transparansi juga mendorong terwujudnya persaingan yang sehat di antara peserta tender, menghasilkan penawaran yang

kompetitif untuk kepentingan proyek jalan raya. Keberadaan transparansi juga menjaga akuntabilitas dalam panitia tender, sebab segala proses dapat dimonitor oleh masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk terus menggalakkan langkah-langkah yang mendukung transparansi dalam proses tender proyek jalan raya. Ini termasuk memastikan seluruh informasi terkait dapat diakses publik, menggunakan platform elektronik yang aman, memberikan pelatihan tentang transparansi kepada panitia tender, dan membangun budaya transparansi dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya memperkuat aspek transparansi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas informasi terkait proses seleksi kontraktor, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung integritas dan kualitas dalam pelaksanaan proyek jalan raya tersebut. Dengan adanya transparansi dalam proses tender, diharapkan bahwa pelaksanaan proyek jalan raya dapat berlangsung dengan lebih adil, kompetitif, dan efisien. Hal ini akan berujung pada penyelesaian proyek dengan kualitas yang lebih baik serta pemberian manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Di Kota Semarang, transparansi dalam Dinas PU tercermin dalam beberapa aspek yang krusial. Dinas PU Kota Semarang telah mengadopsi kebijakan untuk memberikan informasi terbuka kepada publik mengenai proyek-proyek jalan raya. Hal ini tercermin dalam penerbitan laporan berkala, baik secara daring maupun melalui media cetak, yang memuat detail tentang proyek-proyek yang sedang berjalan, termasuk alokasi anggaran, tahapan pelaksanaan, dan progres aktual. Langkah ini memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memantau dan memahami perkembangan proyek jalan raya yang sedang dilakukan.

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan mutlak diperlukan dalam negara demokrasi. Keterbukaan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan reaksi dan kritik mereka terhadap pemerintah yang dianggap tidak transparan. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan juga memerlukan pola pikir yang terbuka. Untuk membina komunikasi yang harmonis antara Dinas Pekerjaan Umum dan masyarakat, transparansi ditunjukkan melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur serta kritik dan saran terhadap implementasi ide-ide baru Dinas Pekerjaan Umum. Untuk menjaga transparansi tersebut, masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pembangunan dari awal hingga akhir, mulai dari pelaksanaan proses perencanaan pembangunan hingga seterusnya. Hal ini memungkinkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari hasil pembangunan. Dalam upaya mewujudkan transparansi, Dinas PU juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek jalan raya. Melalui forum-forum terbuka, lokakarya, atau pertemuan publik, pihak Dinas PU aktif mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan infrastruktur jalan. Langkah ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai sudut pandang serta kebutuhan riil masyarakat.

Dalam aspek transparansi pengadaan barang dan jasa, seperti dalam pemilihan bahan konstruksi yang digunakan dalam pembuatan jalan raya yang harus memenuhi standar kualitas tertentu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memiliki langkah-langkah yang terstruktur. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah pembuatan spesifikasi teknis (spektek) yang

menguraikan secara detail berbagai persyaratan teknis yang harus dipenuhi, mulai dari ketebalan jalan, beban muatan yang dapat ditanggung, hingga kekuatan material seperti besi yang diperlukan. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa konstruksi jalan raya memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, DPU memiliki tim pengawasan internal yang bertanggung jawab untuk memantau proses pelaksanaan proyek secara langsung. Tim ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan jalan sesuai dengan spektek yang telah ditetapkan. Mereka melakukan pemantauan secara berkala terhadap berbagai tahapan konstruksi, memeriksa bahan-bahan yang digunakan, dan memastikan bahwa proses pelaksanaan proyek sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kolaborasi dari spesifikasi teknis yang terperinci, tim pengawasan internal yang terlatih, dan pemeriksaan laboratorium yang teliti, DPU berupaya memastikan bahwa proses pengadaan bahan konstruksi untuk jalan rayadilakukan dengan transparan dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi landasan penting dalam pembangunan infrastruktur yang aman, tahan lama, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) telah menghadirkan sebuah inovasi dengan meluncurkan sebuah inovasi canggih, yaitu sistem informasi bernama SIPU (Smart Infrastruktur Pekerjaan Umum). SIPU memungkinkan warga Semarang untuk terlibat aktif dalam pemantauan dan perbaikan infrastruktur kota dengan menggunakan platform mobile dan web yang mudah diakses. Tujuan utama dari SIPU adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melaporkan masalah infrastruktur, seperti kerusakan jalan, trotoar, atau sistem drainase, sehingga Dinas PU dapat merespons secara tepat dan efisien. Implementasi SIPU dalam pemantauan dan perbaikan infrastruktur kota memiliki sejumlah manfaat, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, SIPU memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di sekitar mereka. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengirim laporan mengenai kerusakan jalan, trotoar, sistem drainase, atau infrastruktur lain yang memerlukan perbaikan, serta dapat secara real-time memantau perkembangan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas PU terhadap laporan mereka. Selain lewat SIPU, Ketanggaan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengelola sistem informasi ini ditunjukkan dengan segera melakukan pemeriksaan (survei) terhadap pemberitaan dan pemberitahuan media massa untuk mengetahui apakah kondisi jalan memadai.³ Termasuk pemberitaan masyarakat dan berita dari instagram, twitter, dan media sosial lainnya mengenai kerusakan jalan. Jika parah, akan diambil tindakan untuk mengumpulkan data administratif dan kondisi jalan. Dalam proses pelayanan, waktu pelayanan merupakan hal yang sangat menentukan. Lebih jauh lagi, SIPU bukan sekadar alat pelaporan, tetapi juga merupakan sarana komunikasi dua arah yang memungkinkan interaksi antara pemerintah daerah dan warganya. Melalui platform ini, terbentuklah sinergi yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas infrastruktur kota. Hal ini tidak hanya memfasilitasi pelaporan masalah, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait proses perbaikan, membangun

pemahaman yang lebih baik, dan merasa didengar serta terlibat secara nyata dalam proses pembangunan kota.

Data statistik yang menggambarkan kondisi jaringan jalan di Kota Semarang menjadi sebuah landasan penting dalam menjaga mobilitas dan konektivitas dalam kehidupan kota. Jaringan jalan yang membentang sepanjang 1.012 ruas, dengan total panjang mencapai 319 kilometer, memegang peranan krusial dalam menjaga arus transportasi dan memfasilitasi aktivitas masyarakat sehari-hari. Mayoritas jalan, sekitar 55.1%, terkategori sebagai jalan yang dalam kondisi baik, menjadi tulang punggung bagi pergerakan dan kelancaran aktivitas kota. Namun, data statistik tersebut juga mengungkapkan aspek penting terkait kondisi sebagian jaringan jalan. Sekitar 35.6% jalan menunjukkan tanda-tanda kondisi sedang yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih dalam pemeliharaan dan perbaikan. Selain itu, terdapat sekitar 6.4% jalan yang menunjukkan gejala kerusakan ringan, sementara hanya sekitar 2.8% jalan yang diklasifikasikan dalam kondisi rusak. Tingkat klasifikasi kondisi jalan ini menjadi cerminan penting bagi pemeliharaan dan keamanan lalu lintas di Kota Semarang. Meskipun mayoritas jalan dalam kondisi baik, namun terdapat proporsi yang signifikan memperlihatkan tanda-tanda kerentanan terhadap penurunan kualitas. Oleh karena itu, memperhatikan dan memprioritaskan perbaikan pada jalan-jalan yang menunjukkan kondisi sedang dan tanda-tanda kerusakan ringan menjadi esensial. Langkah ini diperlukan guna memastikan keberlangsungan kelancaran serta keamanan lalu lintas bagi warga serta pengguna jalan secara keseluruhan. Integrasi informasi seputar kondisi jalan ini dengan implementasi sistem informasi SIPU menjadi langkah progresif dalam memastikan perbaikan infrastruktur kota. SIPU, dengan memungkinkan partisipasi aktif warga dalam pemantauan dan perbaikan infrastruktur melalui platform mobile dan web, dapat menjadi salah satu solusi yang mendukung pemeliharaan jalan secara proaktif. Dengan data yang dihasilkan oleh SIPU, pemerintah dan masyarakat bisa lebih terarah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas jaringan jalan, menjadikan Kota Semarang sebagai tempat yang aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh warganya. Top of Form

Bagi pemerintah, SIPU menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi yang ditawarkan oleh SIPU memungkinkan masyarakat untuk melihat langsung bagaimana tindak lanjut dilakukan atas laporan yang mereka sampaikan. Dengan demikian, SIPU dapat membantu mencegah terjadinya praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang dalam proses perbaikan infrastruktur. Tidak hanya itu, implementasi SIPU memiliki dampak positif yang sangat beragam bagi masyarakat, antara lain dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan infrastruktur kota, meningkatkan efisiensi perbaikan infrastruktur, serta meningkatkan kepuasan terhadap layanan pemerintah. Manfaat-manfaat ini membawa harapan akan pembangunan kota yang lebih baik, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan lebih berkelanjutan. Untuk memaksimalkan manfaat dari SIPU, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan SIPU, memperbaiki kualitas layanan, serta memperkuat koordinasi antara Dinas PU dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa implementasi

SIPU tidak hanya menjadi suatu inovasi, tetapi juga menjadi perwujudan nyata dari keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun kualitas infrastruktur dan lingkungan kota yang lebih baik.

Dinas PU juga memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Penurunan tingkat korupsi dan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa diwujudkan melalui penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Peningkatan kualitas pekerjaan dan layanan itu terbukti dari keberadaan sistem e-procurement yang dioperasikan oleh Dinas PU. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PBJ dengan menggunakan aplikasi penawaran elektronik adalah ketersediaan peralatan elektronik yang baik. Pengetahuan teknologi yang andal, peralatan elektronik, dan infrastruktur jaringan internet yang memadai diperlukan untuk keberhasilan penerapan sistem pengadaan e-Procurement PBJ. Pada dasarnya, kedua sistem yang digunakan untuk lelang tidak terlalu berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada fakta bahwa e-procurement dilakukan secara daring melalui situs web LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) guna meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Penerapan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh Dinas PU Kota Semarang adalah bentuk nyata dari upaya peningkatan dalam pelayanan dan kualitas kerja dinas tersebut. Sistem ini diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penggunaan aplikasi atau platform daring yang memungkinkan akses informasi proyek jalan raya secara real-time telah membantu masyarakat memantau progres proyek dengan lebih mudah. Data aktual yang diperbarui secara teratur memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat terkait perkembangan proyek kepada masyarakat.

Dalam diskusi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan proyek jalan raya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, tergambar upaya serius pemerintah dalam meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek infrastruktur. Langkah-langkah inovatif seperti penerapan sistem informasi, platform elektronik untuk tender proyek, dan aplikasi partisipatif seperti SIPU menunjukkan komitmen kuat untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemantauan dan perbaikan infrastruktur kota. Dalam rangka mencapai infrastruktur yang lebih handal dan berkualitas, tantangan besar seperti menjaga transparansi dalam setiap tahap proyek, memastikan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, serta pemeliharaan jalan yang tepat waktu menjadi fokus utama. Meskipun terdapat langkah-langkah progresif yang diambil, pemantauan berkala dan evaluasi terus-menerus menjadi penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan dalam peningkatan infrastruktur jalan raya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur, yang ditandai dengan partisipasi dalam pelaporan masalah, memberikan harapan besar bagi pembangunan kota yang lebih aman, nyaman, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Dalam konteks ini, transparansi dan partisipasi bukan hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah prinsip yang memandu proses pembangunan menuju kebaikan bersama. Kota Semarang menunjukkan komitmen yang kuat untuk

memperbaiki infrastruktur jalan raya dengan pendekatan yang inklusif dan transparan. Namun, kesinambungan dan pemeliharaan upaya ini menjadi tantangan penting yang harus diatasi dalam menjamin infrastruktur yang berkesinambungan dan memberikan manfaat maksimal bagi warga kota. Ke depannya, penerapan teknologi informasi, pengawasan yang lebih ketat, serta keterlibatan aktif masyarakat akan menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kota Semarang. Dengan terus berupaya menjaga integritas dan transparansi, Kota Semarang dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan proyek jalan raya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Untuk kendala utama sendiri setiap daerah pasti memiliki masalah yang berbeda-beda tergantung kebijakan dan kondisi dari daerah masing-masing. Jika dilihat dari data 5-10 tahun terakhir bisa ditemukan bermacam kendala baik di lapangan maupun di dalam administrasi yang berujung pada batalnya kontrak atau putusnya kontrak proyek jalan yang ada di Kota Semarang.

⁴Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat. "(Clarkson H.Oglesby, 1999).

Dalam mengatasi segala kendala baik di lapangan atau administrasi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki SOP tersendiri dalam menghadapi situasi baik darurat (urgent) atau yang sifatnya Proyek jangka panjang tak jarang pula mengikutkan pihak ketiga dalam penyelesaian di lapangan baik swakelola maupun pengaduan masyarakat tentunya secara langsung ataupun secara daring yang saat ini memang menjadi trend tersendiri dalam masyarakat dalam upayanya ikut serta dalam mengawasi dan pengelolaan jalan raya di kota Semarang. Berikut beberapa kendala:

1. Anggaran

Keterbatasan Anggaran adalah Salah satu kendala utama dalam pengelolaan proyek jalan raya adalah keterbatasan anggaran. Pembangunan infrastruktur jalan seringkali membutuhkan biaya yang besar, dan keterbatasan anggaran bisa menghambat proyek atau menyebabkan penundaan dalam penyelesaian proyek yang direncanakan.

Keterbatasan anggaran merupakan dinding yang tak terhindarkan dalam merealisasikan proyek infrastruktur jalan. Bayangkan proses ambisius pembangunan jalan yang mengalami kebuntuan karena sumber daya finansial yang terbatas. Sebuah proyek jalan raya yang telah dirancang secara cermat, dengan segala detail teknisnya, terkadang harus berhenti di tengah jalan karena tak mampu menembus batas biaya yang dianggarkan. Akibatnya, ruang publik terbuka untuk transportasi tersebut tidak hanya tertunda untuk dinikmati, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tak terelakkan. Bukan hanya sekadar proyek terhenti, namun dampaknya bisa menyebar ke wilayah sekitarnya; perdagangan terganggu, mobilitas terhambat, dan ketidakpastian ekonomi merajalela. Inilah dilema nyata yang dihadapi oleh para pengelola proyek jalan raya, yang harus mengelola sumber daya finansial dengan bijaksana agar jalan menuju infrastruktur yang berkualitas tetap terbuka tanpa mengorbankan efisiensi atau kualitas pembangunan.

Pernah dalam 2-3 tahun kebelakang saat pandemi Covid-19 anggaran daerah untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tidak sesuai dengan anggaran seharusnya karena dialihkan ke Dinas Dinas yang lain yang lebih membutuhkan karena pemerintah pusat menganggap bahwa saat itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tidak teralumulumbutuhkan anggaran yang besar dan juga lebih fokus ke penanganan Pandemi Covid-19 dan akibatnya beberapa hal yang perlu maintenance dan juga perawatan rutin menjadi tidak tercover.

2. Koordinasi Antar Stakeholder

Terkadang, koordinasi yang kurang baik antara pihak terkait seperti pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat bisa menghambat kemajuan proyek. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan prioritas, komunikasi yang kurang efektif, atau kurangnya pemahaman bersama terkait rencana proyek. Koordinasi yang optimal antara pihak terlibat merupakan fondasi utama bagi kesuksesan proyek infrastruktur, namun kenyataannya, hal ini seringkali menjadi tantangan besar. Ambisi suatu proyek bisa terpatahkan oleh ketidakseimbangan prioritas di antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat. Misalnya, saat pemerintah daerah memiliki agenda prioritas yang berbeda dengan visi keseluruhan proyek yang ingin direalisasikan, hal ini seringkali mengakibatkan kebingungan dan hambatan dalam proses pembangunan. Lebih jauh lagi, komunikasi yang kurang efektif atau bahkan terputus juga dapat menjadi kendala serius. Ketika informasi terkait proyek tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat atau kontraktor, hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, rencana pembangunan jalan tertunda atau bahkan terhenti karena kurangnya pemahaman bersama terkait tenggat waktu atau tujuan akhir proyek. Akibat dari kurangnya koordinasi ini dapat merembet luas. Tidak hanya mengganggu jadwal proyek, namun juga berpotensi menyebabkan peningkatan biaya karena perubahan-perubahan yang harus dilakukan akibat ketidaksesuaian antara pihak. Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses pembangunan itu sendiri. Ketika proyek terhambat oleh kurangnya koordinasi, kepercayaan publik bisa luntur, menyebabkan ketidakpuasan yang berkelanjutan terhadap pelayanan publik dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengakui peran krusial koordinasi antar stakeholder dalam kesuksesan proyek infrastruktur. Langkah-langkah nyata seperti meningkatkan komunikasi terbuka, menyelaraskan visi dan prioritas, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi landasan kuat bagi kemajuan proyek yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan."

3. Masalah Teknis

Masalah teknis merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat kelancaran sebuah proyek infrastruktur. Perencanaan yang kurang matang menjadi salah satu akar permasalahan utama. Terkadang, kekurangan dalam tahap perencanaan mengakibatkan berbagai kebingungan di lapangan. Misalnya, proyek jalan raya yang dijalankan tanpa evaluasi yang komprehensif bisa menghadapi masalah serius seperti ketidaksesuaian topografi dengan desain yang direncanakan,

mengakibatkan penyesuaian besar-besaran yang memperlambat proses dan meningkatkan biaya.

Selain itu, pemilihan material yang tidak tepat juga dapat memicu masalah teknis yang signifikan. Misalnya, penggunaan material yang kurang tahan terhadap kondisi lingkungan atau intensitas penggunaan jalan akan mempercepat degradasi jalan. Dalam skala besar, hal ini bukan hanya menambah beban biaya perawatan jangka panjang, tetapi juga memperpendek umur pakai jalan yang seharusnya lebih tahan lama.

Tak kalah pentingnya, masalah desain yang muncul selama pelaksanaan proyek bisa menjadi hambatan serius. Revisi atau perubahan desain yang mendadak memerlukan waktu tambahan dan berpotensi menunda jadwal penyelesaian proyek. Jika tidak ditangani dengan cermat, masalah desain yang terjadi di lapangan dapat mengganggu keseluruhan proses konstruksi dan memengaruhi kualitas serta keamanan infrastruktur yang sedang dibangun.

Perbaikan masalah teknis memerlukan pendekatan yang holistik dan keterlibatan aktif dari para ahli terkait. Evaluasi menyeluruh pada tahap perencanaan, pemilihan material yang tepat berdasarkan analisis lingkungan dan kebutuhan jangka panjang, serta kesediaan untuk menyesuaikan desain secara cepat namun tetap efisien saat berada di lapangan, menjadi kunci untuk mengatasi kendala teknis yang sering muncul dalam proyek infrastruktur jalan raya.

⁵Menurut Hardiyatmo, H.C dalam buku yang berjudul *Pemeliharaan Jalan Raya* (2007) menyatakan bahwa "jenis - jenis kerusakan perkerasan jalan lentur dapat diklasifikasikan menjadi 6 antara lain deformasi, retak (*crack*), kerusakan di pinggir perkerasan, kerusakan tekstur permukaan jalan, lubang (*potholes*), tambalan dan tambalan galian utilitas (*patching dan utility cut patching*)."

Kerusakan jalan adalah sebuah peristiwa yang disebabkan oleh beberapa faktor dan menimbulkan tidak nyamanan pada peserta pengguna jalan. Faktor penyebab termasuk air, cuaca, suhu, beban berlebihan dan sebagainya. Kerusakan konstruksi Permukaan jalan mungkin rusak beberapa faktor berikut:

- a. Lalu lintas yang dapat berupa: peningkatan pemuatan dan pengulangan pemuatan; air yang mungkin berasal dari air hujan, sistem drainase jalan juga kurang baik air meningkat karena aksi kapiler;
- b. Bahan konstruksi perkerasan, faktor ini mungkin karena sifat materialnya dengan sendirinya atau bisa juga disebabkan oleh sistem pemrosesan yang buruk;
- c. Iklim, Indonesia mempunyai iklim tropis suhu udara dan curah hujan total tinggi adalah salah satu alasannya kerusakan jalan; kondisi tanah yang tidak stabil, Faktor ini mungkin disebabkan sistem aplikasinya kurang bagus atau bisa juga karena sifat lapisan tanah di bawahnya manayang tidak baik;
- d. Proses pemadatan lapisan diatas tanah bagian bawah yang buruk.

4. Kontroversi Masyarakat

Kontroversi Masyarakat: Terkadang, terdapat ketidakpuasan atau kontroversi dari masyarakat terkait proyek jalan, baik terkait dengan manfaatnya, dampak sosial, atau dampak lingkungan. Hal ini bisa memperlambat atau bahkan

menghentikan proyek jika tidak ditangani dengan baik. Kontroversi masyarakat terkait proyek jalan sering kali menjadi titik sensitif yang dapat mengganggu kelancaran dan kesinambungan proyek infrastruktur. Ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat bisa berasal dari beberapa aspek, mulai dari ketidakjelasan manfaat proyek, dampak sosial yang tidak diantisipasi dengan baik, hingga perhatian terhadap dampak lingkungan yang mungkin terabaikan.

Misalnya, ada proyek jalan raya yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, tetapi jika manfaatnya tidak disampaikan secara transparan kepada masyarakat, ketidakpastian akan tujuan proyek tersebut bisa menimbulkan keraguan atau ketidakpuasan. Di sisi lain, aspek sosial juga menjadi perhatian, terutama jika proyek jalan merambah ke wilayah yang mengganggu pemukiman atau kehidupan sehari-hari masyarakat. Misunderstanding atau kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bisa menciptakan ketegangan yang memperlambat kemajuan proyek.

Dampak lingkungan juga sering menjadi perdebatan. Pembangunan jalan raya seringkali berpotensi untuk merusak ekosistem alami atau menimbulkan polusi lingkungan yang signifikan. Jika kepedulian terhadap lingkungan tidak diberikan perhatian yang cukup, reaksi masyarakat bisa berkembang menjadi protes atau bahkan gugatan hukum yang berujung pada penundaan atau penghentian proyek.

Ketika kontroversi dari masyarakat tidak ditangani dengan baik, risiko bagi kelangsungan proyek sangat besar. Bukan hanya sekadar penundaan, tetapi juga potensi penghentian proyek yang bisa mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan ketidakpastian terhadap ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

⁶Oleh karena itu, pentingnya komunikasi yang terbuka, keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan, serta evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan lingkungan merupakan landasan penting dalam mengelola kontroversi masyarakat terkait proyek jalan raya. Hanya dengan melibatkan masyarakat secara transparan dan memberikan perhatian terhadap kepentingan mereka, proyek-proyek ini dapat berjalan lancar dan diterima oleh publik secara luas.

5. Kendala Administrasi

Bentuk pelanggaran administratif yang paling umum termasuk penundaan jangka panjang, penelantaran ketidakpatuhan, membuat proses administrasi menjadi lambat dan tidak efisien. Seiring berjalannya waktu, pelayanan publik menjadi tidak menentu. membentuk nepotisme salah urus yang menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan dan kolusi, memihak tanpa kriteria objektif, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan keputusan pejabat dapat merugikan pihak lain. Bentuk salah urus juga dapat bermanifestasi sebagai pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan, seperti pemalsuan dokumen tertentu, aktivitas ilegal atau ofensif ketentuan yang berguna bagi kelompok atau dirinya sendiri atau orang lain, seperti saudara dan orang yang dicintai. Banding administratif mungkin disertakan yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang mempengaruhi mutu pelayanan publik bagi masyarakat mencakup intervensi yang mempengaruhi penyediaan layanan publik.

Pelanggaran administratif berdasarkan UU Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008 Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan perbuatan

melawan hukum atau perbuatan di luarnya pihak yang berwenang menggunakan otorisasi untuk tujuan selain dari tujuan otorisasi tersebut termasuk kelalaian atau wanprestasi pelayanan publik yang disediakan oleh administrasi publik dan pemerintah menimbulkan kerugian materiil dan/atau materiil terhadap masyarakat dan perseorangan. Malpraktik administratif adalah pengabaian dan pengabaian terhadap kewajiban yang timbul karena undang-undang pada kategori pelanggaran dan penyimpangan, masyarakat sebagai pihak untuk memperoleh hak menggunakan pelayanan publik. Kesalahan administratif terletak pada pelaksanaan pelayanan publik yang penyelenggaraannya tidak memenuhi prinsip kewajaran dan administrasi umum sangat baik. Dan dalam pelaksanaan proyeknya Dinas PU tidak lepas dari tender, Berdasarkan UUAM dalam pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif. Selain itu tender harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan asas-asas persaingan usaha yang sehat yaitu: Tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi oleh semua calon peserta tender dengan kompetensi yang sama.. Tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi tertentu. Tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknis produk tertentu.⁷ Tender harus bersifat terbuka, transparan, dan diumumkan dalam media massa dalam jangka waktu yang cukup. (Susanti Adi Nugroho, 2012:283)

Untuk pelaksanaan administrasi mengenai proyek jalan raya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sendiri sudah mulai transparan semenjak semua transaksi tender proyek dan kegiatan yang akan dan sudah dilakukan terangkum di website LPSE. Kendala yang mungkin masih terjadi hanya sekilas dan minim sekali jumlahnya karena dari Pihak Dinas PU Kota Semarang segala pengadaan dan kerjasama proyek sudah transparan dan bisa dilihat bersama oleh masyarakat. Selain itu, mereka juga memiliki tim tersendiri yang mengurus dan mengawasi bagian Administrasi, termasuk tender, pengadaan barang dan proyek-proyek besar pasti sudah ada perencanaan yang matang dan penuh perhitungan, kendala yang pernah terjadi adalah ketika terdapat proyek antara Dinas PU Kota Semarang dan terikat kontrak dengan salah satu kontraktor dalam proyek jalan atau jembatan besar di kota Semarang terjadi kasus yang membuat proyek itu harus mangkrak dan gagal karena dideteksi bahwa kontraktor tidak/menunda pembayaran terhadap pekerja dan dalam pengawasan Dinas PU Kota Semarang.

KESIMPULAN

Pengelolaan proyek jalan raya di Kota Semarang telah menjadi tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah yang diambil, seperti pembentukan kerangka regulasi rinci, telah membawa perubahan signifikan. Terdapat serangkaian kebijakan yang mengatur pengelolaan proyek jalan raya, termasuk peraturan daerah tentang pengelolaan jalan, pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta kontrak yang menegaskan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan proyek.

Dalam upaya meningkatkan transparansi, Pemerintah Kota Semarang telah mengadopsi pendekatan modern dengan melaksanakan proses tender secara daring melalui platform resmi. Ini memfasilitasi akses informasi terkait dengan proses

tender kepada peserta, pihak terkait, dan masyarakat umum, mengurangi potensi kecurangan.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memiliki peran penting dalam pengelolaan proyek jalanraya di Kota Semarang. Transparansi dalam aktivitas dan keputusan yang diambil oleh DPU menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas dan keberhasilan proyek infrastruktur. DPU juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek jalan raya, memastikan keputusan mempertimbangkan berbagai sudut pandang serta kebutuhan riil masyarakat.

Namun, terdapat kendala yang dihadapi dalam pengelolaan proyek jalan raya. Keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar stakeholder, masalah teknis seperti perencanaan yang kurang matang atau pemilihan material yang tidak tepat, kerusakan jalan, dan kontroversi masyarakat dapat menghambat kelancaran proyek.

Kendala seperti keterbatasan anggaran dan masalah teknis memerlukan pendekatan yang holistik, koordinasi yang baik antar stakeholder, serta perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan. Peningkatan transparansi, melalui platform elektronik dan pendekatan partisipatif dengan masyarakat, menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menjaga kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

SARAN

Dalam mengatasi keterbatasan anggaran, bisa dipertimbangkan pemilihan prioritas proyek yang lebih krusial. Pengoptimalan penggunaan anggaran dan pengalokasiannya dapat membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, pemerintah daerah bisa mencari sumber pendanaan alternatif, misalnya dengan menggandeng sektor swasta atau mengajukan proyek ke lembaga donor. Melalui perencanaan yang lebih komprehensif dan komunikasi yang efektif antar stake holder, seperti pemerintah, kontraktor, dan masyarakat, bisa mengurangi hambatan yang disebabkan oleh koordinasi yang kurang baik. Koordinasi yang lebih baik akan mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang mungkin muncul. Mengatasi masalah teknis dalam proyek jalan, termasuk perencanaan yang lebih matang, pemilihan material yang tepat, dan adaptabilitas terhadap perubahan desain di lapangan, dapat membantu menghindari permasalahan teknis yang sering muncul. Kontroversi dari masyarakat bisa diatasi dengan lebih banyak berkomunikasi dan menyampaikan manfaat proyek dengan transparan. Dinas PU dapat membuat forum terbuka, pertemuan publik, atau kampanye edukasi untuk menjelaskan manfaat proyek dan menangani kekhawatiran masyarakat.

Penggunaan teknologi seperti SIPU adalah langkah positif. Dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan teknologi serupa atau melengkapi platform tersebut dengan fitur-fitur yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prakondisi jalan raya juga menjadi faktor penting. Mungkin perlu evaluasi dan perbaikan pada tahap awal untuk meminimalkan kerusakan dan pemeliharaan lebih lanjut. Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan. Ini akan memberikan rasa kepemilikan pada proyek dan meminimalisir kontroversi. Memberikan pelatihan kepada pihak terkait, termasuk masyarakat, tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam

pemantauan dan memahami proses proyek lebih baik dan menyusun rencana tindakan untuk setiap kendala dengan memperhatikan solusi-solusi di atas dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan proyek jalan raya di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Wardani, Agung Kristiawan, Nur Samsudin. (2019). *ANALISIS KERUSAKAN JALAN AKIBAT VOLUME KENDARAAN “STUDI KASUS : JALAN RAYA SEMARANG BOJA KM 38 – 42”*, 9. Retrieved 11 Friday, 2023
- Bahmid, & Khairunisa, F. (2021, Oktober). PENGARUH PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMENANG TENDER. *Masalah-Masalah Hukum, Vol 50, No 4*, 409-419.
- Bakhtiar, N., Suwandi, M., & Sari, N. R. (2023, April). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS REALISASI ANGGARAN PUBLIK BERDASARKAN PRINSIP ISLAM DALAM MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar). *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research, Volume 2, Number 1*, 45-59.
- Fachri Hafizd. (2017). MEKANISME PENGATURAN TENDER REKONSTRUKSI JALAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO. 84. Retrieved 11 Friday, 2023
- Faisal , N. I., Morasa, J., & Mawikire, L. M. (2017). ANALISIS SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA (PENUNJUNG LANGSUNG) PADA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12 No 2*, 1122-1132.
- Ni Made Anggia Paramesthi Fajar. (2018). *MAL ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI NEGARA*. Retrieved 11 Friday, 2023
- Nur, A. S., Sihabudin, A., & Syadzily, A. H. (2019, Januari). KINERJA PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2017. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS), Volume 3 Nomor1*, 448-449.
- Rahmayani, W. O., Rasmuin, & Didi, L. (2022, Agustus). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton. *ADMINISTRATIO : JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI NEGARA, Volume 11, Nomor 2*, 84-88.
- SITI KHAJAR MUSTAFA. (2018). *ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERKAIT PEMELIHARAAN JALAN OLEH SATUAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR*. Retrieved 11 Friday, 2023
- Supriyono, O., & Askafi, E. (2022, April 28). Problematika E-Procurement Untuk Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. *Otonomi, Vol22 No 1*, 211-220.